

**Judul** : Caleg eks terpidana didorong berani ungkap status  
**Tanggal** : Jumat, 10 November 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

# Caleg Eks Terpidana Didorong Berani Ungkap Status

*Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan kesediaan membuka daftar riwayat hidup, termasuk status hukum bagi eks terpidana, menjadi kewenangan caleg masing-masing.*

**TRI SUBARKAH**

[subarkah@mediaindonesia.com](mailto:subarkah@mediaindonesia.com)

**S**EJAK diumumkan secara resmi ke publik, pada Sabtu (4/11), belum semua calon anggota legislatif (caleg) bersedia membuka daftar riwayat hidup di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu termasuk kesediaan mantan terpidana yang berkontestasi pada Pemilu 2024 mengungkapkan status hukum mereka.

Berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 27 caleg eks koruptor yang masuk tercatat dalam daftar calon tetap (DCT)

Pemilu Legislatif DPR RI 2024. Sementara itu, caleg eks koruptor untuk tingkat DPRD kabupaten/kota berjumlah 22.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji menjadi salah satu caleg DPR RI yang bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Bahkan, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada daerah pemilihan Sumatra Selatan II itu berani membuka status hukumnya.

Pada menu Profil Susno yang tercantum di laman [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/dct\\_dpr/profile](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/dct_dpr/profile), status hukum Susno tertulis 'Mantan Terpidana'. Susno merupakan mantan terpidana kasus korupsi

dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009.

Kesediaan Susno membuka status hukum juga diikuti caleg DPR RI dari PKB lain, misalnya Huzrin Hood yang maju di dapil Kepulauan Riau, Rino Lande (Jawa Timur V), dan Yansen Akun F. (Kalimantan Barat II). Selain dari PKB, ada juga caleg DPR RI Partai NasDem juga bersedia membuka status hukum, yakni Eep Hidayat (Jawa Barat IX).

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengapresiasi para caleg mau membuka status hukum di tengah masih banyaknya kandidat yang bahkan enggan membuka daftar riwayat hidup pada fitur yang diunggah KPU sebah tak mudah bagi eks terpidana untuk berdiri sebagai caleg yang telah ditetapkan KPU. "Ini merupakan langkah progresif dan kejujuran yang dilakukan caleg," kata Neni ke-

pada *Media Indonesia*, kemarin.

## Kesadaran caleg

Neni menilai kesadaran para caleg eks terpidana korupsi dari PKB dan NasDem itu justru berbanding terbalik dengan empat caleg eks terpidana DPR RI yang diajukan PDI Perjuangan. Meski daftar riwayat hidup mereka dapat diakses, empat caleg eks koruptor dari PDIP enggan mengungkapkan status hukum mereka.

Mereka ialah Asep Ajdin (Sumatra Barat II), Mochtar Mohamad (Jawa Barat V), Rokhmin Dahuri (Jawa Barat VIII), dan Al Amin Nasution (Jawa Tengah VIII). Seluruh caleg dari Partai Golkar, termasuk yang berstatus eks koruptor, emoh membuka daftar riwayat hidup sama sekali.

"Kesadaran untuk membuka daftar riwayat hidup sangat krusial untuk diketahui publik. Tanpa adanya kesadaran yang kuat, tidak mungkin caleg melau-

kukan hal demikian," jelas Neni.

Sementara itu, KPU tidak mengumumkan siapa saja caleg yang berstatus eks terpidana. Menurut anggota KPU RI Idham Holik, kesediaan membuka daftar riwayat hidup, termasuk status hukum bagi eks terpidana, menjadi kewenangan caleg masing-masing. Dalam proses pencalonan anggota legislatif, Idham mengatakan pihaknya telah meminta para caleg untuk mengisi daftar riwayat hidup secara jujur.

Pada kesempatan terpisah, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu. Irman melaporkan KPU karena mencoretnamannya dari DCT untuk pemilihan anggota DPD RI pada Pemilu 2024. KPU Sumbar menilai eks napi korupsi kuota gula impor itu tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. (YIP/3)